

SKRIPSI



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pid.B/2013/PN.PKJ)

**OLEH
WAJDAWATI
B 111 10 492**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Kasus Putusan Nomor 26 Pid.B/2013/PN.PKJ)**

OLEH :

**WAJDAWATI
B11110492**

SKRIPSI

**Pada
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN SECARA BERSAMA-SAMA**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 26/Pid. B/2013/PN.PKJ)

Disusun dan diajukan oleh :

WAJDAWATI

B 111 10 492


Telah dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Program Studi Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Kamis, 27 Februari 2014
dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua


Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H
NIP. 19531124 197912 1 001

Sekretaris


Kaisaruddin Kamaruddin, S.H
NIP. 19660320199103 1 005

**A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik**


Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

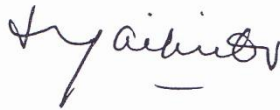
Dengan ini menerangkan bahwa proposal dari:

N a m a : WAJDAWATI
Nomor Induk : B 111 10 492
Bagian : Hukum Pidana
Judul : "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pembunuhan Secara Bersama-sama (Studi
Kasus Putusan Nomor 26 / Pid.B / 2013 /
PN.PKJ)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 28 Januari 2014

Pembimbing I



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H
NIP. 19531124 197912 1 001

Pembimbing II



Kaisaruddin Kamaruddin, S.H
NIP. 19660320 199103 1 005

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : WAJDAWATI

No. Pokok : B111 10 492

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana pembunuhan Secara
Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor
26/Pid.B/2013/PN.PKJ)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2014



an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

WAJDAWATI (B111 10 492) “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Secara Bersama-sama” (Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pid.B/2013/PN.Pangkajene). Dibimbing oleh **Bapak M. Syukri Akub** selaku pembimbing I dan **Bapak Kaisaruddin Kamaruddin** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu pertama, untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama, dan yang kedua, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan yaitu Pengadilan Negeri Pangkajene, dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dakwaan.

Dari penelitian yang dilakukan, Penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, (1). Penerapan hukum pidana materiil oleh dalam Putusan no. 26/Pid.B/2013/PN.Pangkajene belum tepat. Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan Dakwaan Subsidiaritas yakni Dakwaan Primair Pasal 338 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 KUHP, Subsidiar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Lebih Subsidiar Pasal 354 ayat (2) jo Pasal 55 KUHP. Jaksa penuntut umum tidak menjerat terdakwa dengan Pasal 340 KUHP, yang menurut penulis tindak pidana yang dilakukan terdakwa terdapat unsur “berencana”. (2). Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No. 26/pid.B/2013/PN.Pangkajene sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum menjatuhkan putusan hakim melakukan pertimbangan yaitu dengan pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti serta pasal-pasal hukum pidana dan pertimbangan non yuridis dengan melihat dari latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan berkat, rahmat dan izin-Nya sehingga penulisan dan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan No. 26/Pid.B/2013/PN.PKJ) dapat terselesaikan. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Pertama-tama Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada kedua orangtua Penulis, yakni Ayahanda H. M. Nasir Ibong (Aji Kumis) dan Ibunda Hj. Juriati (Mamak Juwi) yang dengan tulus dan sabar memberikan cinta, kasih sayang yang tak terhingga dalam membesarkan serta dalam membantu dan mendukung Penulis meraih cita. Dan kepada kedua saudara Penulis yakni, Kakak Erniwati (Kak Enni) dan Adik Munadiawati (Dede' Congkang) yang telah memberikan do'a dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini Penulis begitu banyak mendapat kesulitan, namun kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui dan

diselesaikan berkat adanya banyak bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu izinkanlah Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas, beserta Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar, S.H., M.H., Bapak Dr. Anshory Ilyas, S.H., M.H., Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, II, III.
3. Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Kaisaruddin Kamaruddin, S.H. selaku pembimbing II yang dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H. Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. dan Ibu Hj. Haeranah, S.H., M.H. selaku tim penguji yang memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik Penulis yang membantu Penulis dalam pengurusan kartu rencana studi.
6. Para dosen pengajar, staf akademik dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Ketua beserta staf Pengadilan Negeri Pangkajene yang membantu Penulis dalam penelitian.

8. Kepala kecamatan Angkona, kepala desa Solo, keluarga besar Bapak Puji yang telah membantu Penulis selama melakukan kuliah kerja nyata (KKN) di Kabupaten Luwu Timur.
9. Seluruh teman-teman KKN Reguler Gelombang 85 Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur, terkhusus Posko Desa Solo, yakni Fitrah Suci Insani, Edi Susilo, Itha Purnama Sari serta Maskar.
10. Keluarga besarku di Pangkep, keluarga H. Side dan Hj. Nursiah (Alm) serta keluarga H. Kamarong (Alm) dan Maemunah (Alm) yang selama ini menjadi pendukung kedua orangtuaku dalam berbagai hal.
11. Keluarga kecilku di Makassar, yakni teman-temanku Arya Fitri, Andi Asmawati dan Sitti Maryam, Anak “Hele-Hele” Nur Aisyah Bachri, Yenni Widyastuti, S.H, Vera Linda Br Sitepu, Fathiya Rizza Amalia, Kattya Nusantara Putri, Hamsiati Hasim, Novi Arniansyah dan Siti Dwi Marwayanti, Anak “Bartender” Muhammad Ikram Nur Fuady, S.H, S. Muchtadin Al Attas, Zulkifli Muchtar, Muhammad Ridwan Saleh, Helmiriyadusshalihin, Adi Suriadi dan Jumardi, serta seluruh teman-teman Kelas K “Konstitusi” yang bersama-sama Penulis dalam suka dan duka menempuh perkuliahan dari semester awal sampai selesai.
12. Sepupu-sepupuku yakni Muhammad Taufik (Kak Opi), Al Humaerah (Dede’ Hera), Tuti Alawiyah (Dede’ Tuthy), Nur Honey Islamiyah Ilyas (Dede’ Ciempak) dan Muhammad Alief Ashar (Dede’ Alefu) yang sudah memberikan do’a dan dukungan kepada Penulis.

13. Sahabat-sahabat SD Negeri 8 Kassikebo, MTsN Ma'rang dan MAN Pangkep, yakni Nurul Fajri, Fitriani, Saddang Husain, Arafah Rusydi, Devi Permata Sukma, Riska Amelia, Amd. Kep, Nur Aida, Musliani Muslimin, Salmiah Mudi, Rosmini, Nur Mita Sari, Zulfiah, Anni Hafsah, Zainuddin, Dedi Rinaldi, Mustakim, Lukman dll yang masih tetap bersama Penulis sampai hari ini.

14. Kepada semua pihak yang telah membantu, memberi dukungan dan do'a serta motivasi selama ini yang tidak sempat Penulis sebutkan.

Limpahan rahmat dan berkah untuk kita semua.

Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu Penulis membuka diri untuk kritik dan saran dalam penyempurnaannya, demi dapat memberi manfaat bagi kita semua, terutama bagi dunia keilmuan.

Billahi Taufik wal Hidayah

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi wabarakatu

Makassar, Februari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	7
1. Pengertian Tindak Pidana	7
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	9
B. Tindak Pidana Pembunuhan	13
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	13
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan	17

C. Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	17
1. Pengertian Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	17
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	18
D. Pidana Dan Pemidanaan	28
1. Tujuan Pemidanaan	28
2. Jenis-Jenis Pidana	30
3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	35
B. Jenis Dan Sumber Data	35
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Kasus Dalam Putusan No. 26/Pid.B/2013/PN.Pangkajene	
1. Posisi Kasus	38
2. Dakwaan Penuntut Umum	40
3. Tuntutan Penuntut Umum	42
4. Amar Putusan	43
5. Analisis Penulis	44
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 2 /Pid.B /2013 /PN. PKJ	
1. Pertimbangan Hakim	48

2. Analisis penulis	51
---------------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	54
---------------------	----

B. Saran	55
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	56
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah berhubungan dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.¹ Dari nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang dianut oleh masyarakat tersebut maka lahirlah hukum sebagai aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian dan kesejateraan.

Hukum pidana merupakan aturan yang diadakan oleh suatu negara yang menentukan tentang perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang yang diancam oleh pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya dan menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman serta

¹ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

menentukan dengan cara bagaimana hukum itu dapat dijalankan atas perbuatan yang telah dilakukan. Perbuatan yang dilarang tersebut seperti pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.

Kejahatan merupakan tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Kejahatan merupakan delik hukum, artinya kejahatan merupakan pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan. Banyaknya kasus pembunuhan yang terjadi dimasyarakat yang kita lihat dari media massa menunjukkan perkembangan kasus pembunuhan akhir-akhir ini cukup meningkat. Pembunuhan tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor, seperti kecemburuan sosial, dendam dan faktor psikologi pelaku kejahatan. Faktor utama dari sebuah kejahatan sebenarnya adalah faktor pendidikan, kurangnya pendidikan yang dimiliki oleh pelaku kejahatan membuat pelaku tidak memikirkan terlebih dahulu akibat yang akan terjadi dari tindakan yang dilakukan.

Pembunuhan itu sendiri diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”

Kejahatan pembunuhan merupakan tindak pidana materiil karena akibat yang muncul dari perbuatan tersebut yang dilarang, akibatnya yaitu

hilangnya nyawa orang lain. Dalam rumusan Pasal 338 KUHP tersebut “menghilangkan nyawa” orang lain merupakan wujud perbuatan atau salah satu syarat terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam hal ini yaitu unsur obyektif.

Dalam beberapa kasus kejahatan seperti kasus pembunuhan yang telah kita bahas sebelumnya, ada beberapa kasus yang pelaku tindak pidananya lebih dari satu orang dimana dalam melakukan tindak pidana, pelaku tidak melakukannya sendirian, terdapat seorang atau beberapa orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, bahwa apabila terdapat seorang atau lebih dari seorang yang ikut serta dalam suatu tindak pidana dapat pula dipidana, yang berarti tidak hanya pelaku tindak pidana itu saja yang dapat dipidana.

Ada beberapa penggolongan peserta pelaku tindak pidana penyertaan yang terdapat dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP yaitu, orang yang melakukan (pembuat: *pleger*), orang yang menyuruh melakukan (pembuat penyuruh: *doen pleger*), orang yang turut serta melakukan (pembuat peserta: *medepleger*), orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: *uitlokker*), dan pembantuan (*medeplichtig*).

Pasal-pasal tersebut merupakan dasar hukum yang menjadi acuan hakim untuk menentukan kedudukan pelaku dalam melakukan tindak pidana dan sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penyertaan. Hakim dalam menentukan sanksi pidana terlebih dahulu harus menafsirkan

pasal-pasal tersebut, dalam hal ini pelaku termasuk kategori apa, dan kemudian dapat mengambil putusan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana.

Seperti yang telah dipaparkan Penulis sebelumnya bahwa kejahatan seperti pembunuhan dapat dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yakni kecemburuan sosial, dendam dan faktor psikologi pelaku kejahatan. Faktor dendam tersebut merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi seseorang melakukan pembunuhan seperti halnya perkara yang Penulis angkat untuk dianalisis yaitu kasus pembunuhan **putusan no. 26/Pid.B/2013/PN.Pkj**. Dalam perkara tersebut pelaku tindak pidana pembunuhan yakni Jemmaing Bin Maddi mempunyai rasa dendam terhadap korban H. Saing Bin H. Rahman, rasa dendam itu muncul dikarenakan adanya sengketa tanah antara kedua belah pihak, pelaku meyakini bahwa korban telah melakukan pemindahan batas patok kebun milik istrinya. Dan menyampaikan rasa keberatannya kepada keluarga korban. Namun korban tidak meberikan respon atas hal tersebut. Hal inilah yang memunculkan rasa dendam didalam diri korban sehingga melatar belakanginya melakukan pembunuhan terhadap korban bersama dengan anaknya yakni Askar Bin Jemmaing.

Dari uraian diatas, Penulis tertarik untuk membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama dan juga membahas dari segi tinjauan

yuridis atas dakwaan dan tuntutan dari jaksa, dengan tidak lupa mengaitkan dengan peraturan yang berlaku, dengan tujuan untuk mengetahui apakah hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis memilih judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Secara Bersama-sama” (Studi Kasus Putusan Nomor 26 /Pid.B/2013/PN.PKJ).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama dalam perkara pidana No. 26/Pid.B/2013/PN.PKJ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana No. 26/Pid.B/2013/PN.PKJ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama dalam putusan No. 26/Pid.B/2013/PN.PKJ

2. Dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama dalam putusan No. 26/Pid.B/2013/PN.PKJ

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama.

2. Kegunaan Secara Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penegak hukum dalam praktik pengambilan kebijakan khususnya dalam menangani masalah tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah dalam ilmu hukum yang mempunyai pengertian yang abstrak. Dalam hukum pidana Belanda dikenal dengan “*strafbaar feit*” yang didalam bahasa Indonesia memiliki terjemahan dengan berbagai istilah, karena tidak ada penetapan penerjemahan istilah yang diberikan oleh pemerintah untuk istilah tersebut yang menimbulkan berbagai pandangan untuk menyamakan istilah “*strafbaar feit*”, seperti “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana”, dan berbagai istilah lain.

Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²

Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.³

² I Made Widnyana, 2010, *Hukum Pidana*, Penerbit Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 34

³ Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 96.

Menurut Pompe, *strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁴ Sedangkan Utrecht menerjemahkan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa tersebut suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *nolaten*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa (*rechtfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.⁵

Kemudian menurut Muljatno, perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶

Sedangkan dalam hukum Islam, tindak pidana (jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan-larangan syarak tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau

⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta. hlm. 20

⁵ Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6

⁶ I Made Widnyana, *Op. Cit*, hlm 34

meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.⁷ Jarimah berarti melakukan setiap perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, atau melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya. Dengan kata lain, berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai tindak pidana apabila telah ditetapkan dan diancamkan suatu hukuman terhadapnya.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”⁸

Penulis dapat berkesimpulan bahwa tindak pidana atau delik adalah sebuah perbuatan yang melawan hukum dan mencocoki rumusan-rumusan delik yang dapat dikenakan sanksi pidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya, dalam setiap tindak pidana harus memiliki unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang

⁷ Achmad Ali, 2010, *Yusril Versus Criminal Justice System*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 48.

⁸ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 92.

ditimbulkan atas perbuatan tersebut. Dimana unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua aspek, yaitu:

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Teoretisi

Beberapa ahli hukum mengemukakan beberapa rumusan tindak pidana, begitu pula dengan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Menurut E.Y. Kanter dan S.R Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:

- 1). Subjek;
- 2). Kesalahan;
- 3). Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- 4). Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- dan
- 5). Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).⁹

Kemudian menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.¹⁰

⁹ Amir Ilyas, *Op. Cit*, hlm. 26

Dan Moeljatno dalam bukunya, mengemukakan bahwa perbuatan pidana (tindak pidana) terdiri dari beberapa unsur atau elemen, yaitu:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.¹¹

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Jonkers, yaitu:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang¹²

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum

¹⁰ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 80

¹¹ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 69

¹² Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 81-82

kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan unsur-unsur dari suatu tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur Objektif

Unsur objektif yaitu unsur yang terdapat di luar si pelaku. Yang terdiri dari, yaitu :

- 1). Sifat melanggar hukum.
- 2). Kualitas dari pelaku.
- 3). Kausalitas.

b. Unsur subjektif

Unsur subjektif yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku atau yang dihubungkan dengan diri pelaku. Yang terdiri dari, yaitu:

- 1). Kesengajaan atau kelalaian.
- 2). Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3). Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4). Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5). Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

B. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak

melawan hukum. Dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 KUHP sampai Pasal 350 KUHP. Dalam Pasal 338 KUHP tindak pidana yang diatur merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*doodslag In Zijn Grondvorm*), yang rumusannya adalah :

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain,
diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”

Unsur yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP tersebut yaitu:

- a. Barangsiapa: ada orang tertentu yang melakukan;
- b. Dengan sengaja: dalam ilmu hukum pidana, dikenal 3 (tiga) jenis bentuk sengaja (*dolus*) yaitu;
 - 1). Sengaja sebagai maksud;
 - 2). Sengaja dengan keinsyafan pasti;
 - 3). Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan/*dolus eventualis*;
- c. Menghilangkan nyawa orang lain.

Sebagian pakar mempergunakan istilah “merampas jiwa orang lain”. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan. Perbuatan yang mana yang dapat merampas/menghilangkan jiwa orang lain, menimbulkan beberapa pendapat yakni:

- a. Teori *Aequivalensi* dari Von Buri yang disebut juga teori *conditio sine qua non* yang menyamaratakan semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat;
- b. Teori *Adaequate* dari van Kries yang juga disebut dengan teori keseimbangan yakni perbuatan yang seimbang dengan akibat;
- c. Teori *Individualis* dan Teori *Generalis* dari T. Trager yang pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut itulah yang menyebabkan; sedangkan menurut teori generalisasi, berusaha memisahkan setiap faktor yang menyebabkan akibat tersebut.¹³

Untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan, yang dapat menghilangkan nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian.¹⁴

¹³ Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.22

¹⁴ Wahyu Adnan, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Gunung Aksara, Bandung, hlm. 45.

Sebagaimana dalam KUHP tindak pidana pembunuhan disebut sebagai tindak pidana terhadap nyawa. Perkataan “nyawa” sering disinonimkan dengan “jiwa”. Kata nyawa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya antara lain sebagai berikut:

- a. Pemberi hidup;
- b. Jiwa, roh;

Sedang kata “jiwa” dimuat artinya antara lain:

- a. Roh manusia (yang ada di tubuh dan yang menyebabkan hidup);
- b. Seluruh kehidupan batin manusia.

Pengertian nyawa dimaksudkan adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut “pembunuhan”.¹⁵

Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- a. Adanya wujud perbuatan;
- b. Adanya akibat berupa kematian (orang lain);
- c. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dengan akibat yang berupa kematian.¹⁶

¹⁵ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materil*, Djambatan, Jakarta, hlm. 5

¹⁶ Ibid,

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

- a. Pembunuhan biasa merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*doodslag*), yang diatur dalam Pasal 338 KUHP;
- b. Pembunuhan yang dikualifikasi atau pembunuhan dengan pemberatan, yakni pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain, yang diatur dalam Pasal 339 KUHP;
- c. Pembunuhan berencana atau “*moord*”, yang diatur dalam Pasal 340 KUHP;
- d. Pembunuhan oleh Ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, diatur dalam Pasal 341, 342, 343 KUHP;
- e. Pembunuhan atas permintaan korban atau yang disebut “*euthanasia*”, yang diatur dalam Pasal 344 KUHP;
- f. Mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolong atau memberi sarana untuk bunuh diri, yang diatur dalam Pasal 345 KUHP;
- g. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan, diatur dalam Pasal 346, 347, 348, 349 KUHP

C. Penyertaan (*Deelneming*)

1. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

Tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama atau dapat juga disebut sebagai tindak pidana penyertaan pembunuhan. Penyertaan atau *deelneming* diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Menurut Adami

Chazawi pengertian penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.¹⁷

Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam:¹⁸

a. Bentuk penyertaan berdiri sendiri.

Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

b. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri.

Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.

2. Bentuk-Bentuk Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu:¹⁹

¹⁷ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 71

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 134

a. Pembuat/*dader* (Pasal 55) yang terdiri dari:

- 1). Pelaku (*pleger*);
- 2). Yang menyuruhlakukan (*doenpleger*);
- 3). Yang turut serta (*medepleger*);
- 4). Penganjur (*uitlokker*).

b. Pembantu/*Medeplichtige* (Pasal 56) yang terdiri dari:

- 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan:
- 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Pelaku atau orang yang melakukan atau *pleger* menurut R. Soesilo ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai pegawai Negeri.²⁰

Sementara menurut Adami Chazawi *pleger* adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang *pleger* harus sama dengan syarat seorang *dader*. Perbuatan seorang *pleger* juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang *dader*.²¹ Adapun menurut Teguh Prasetyo, pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang

¹⁹ Ibid, hlm. 135

²⁰ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, hlm 73

²¹ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 85

memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.²²

Orang yang menyuruhlakukan atau pembuat penyuruh atau *Doenpleger* menurut Adami chazawi adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*). Adapun unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

- a. Alat yang dipakai adalah manusia;
- b. Alat yang dipakai adalah berbuat;
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materil) tidak dapat dipertanggung jawabkan, adalah;

- a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (pasal 44);
- b. Bila ia berbuat karena daya paksa (pasal 48);
- c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat (2));
- d. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
- e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

²² Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 136

Jika yang disuruhkan seorang anak kecil yang belum cukup umur, maka tetap mengacu pada Pasal 45 dan Pasal 47 jo. UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.²³

Dalam Undang-Undang tidak menerangkan secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan, akan tetapi banyak ahli hukum mengambil pengertian dan syarat orang yang menyuruh melakukan yang merujuk pada ketetapan *MvT WvS* Belanda yang menyatakan:

*“yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.*²⁴

Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) menurut R. Soesilo, bahwa dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yakni yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain,

²³ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 137

²⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 88

disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁵

Orang yang turut serta melakukan atau pembuat peserta atau *Medepleger* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama (menurut *MvT*).

Turut mengerjakan sesuatu, yaitu:

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- b. Salah satu memenuhi semua rumusan delik;
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Syarat adanya *medepleger*, antara lain:

- a. Ada kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang;
- b. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Kerja sama secara sadar yaitu adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang. Kerja sama/pelaksanaan bersama

²⁵ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm 73

secara fisik yaitu kerja sama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.²⁶

Orang yang sengaja menganjurkan atau penganjur atau *Uitlokker* adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan (Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP).

Dalam hal ini R. Soesilo berpendapat bahwa orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya, yang disebutkan dalam Pasal 55 KUHP, artinya tidak boleh memakai jalan lain. Disini seperti halnya dengan “suruh melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada “membujuk melakukan”, orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai *pleger* sedang pada “suruh melakukan”, orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.²⁷

Pembantuan (*Medeplichtige*)²⁸ menurut Pasal 56 KUHP, bentuk pembantuan atau pembuat pembantu dibedakan antara pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan dan pemberian bantuan pada saat

²⁶ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 138

²⁷ R. Soesilo, *Op. Cit*, hlm 74

²⁸ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm.141-148

berlangsungnya pelaksanaan kejahatan. Perbedaan antara pemberian bantuan sebelum dan pada saat berlangsungnya kejahatan, ialah pada pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan cara-cara memberikan bantuan telah ditentukan secara *limitative* dalam Pasal 56, yaitu: (1) dengan memberikan kesempatan; (2) dengan memberikan sarana; dan (3) dengan memberikan keterangan.

Ketiga cara tersebut terdapat juga pada bentuk pengancuran. Memberikan kesempatan, adalah memberikan peluang yang sebaik-baiknya dalam hal orang lain untuk melakukan suatu kejahatan. Memberikan sarana adalah memberikan suatu alat atau benda yang dapat digunakan untuk mempermudah melakukan kejahatan. Memberikan keterangan adalah menyampaikan ucapan-ucapan dalam susunan kalimat yang dimengerti oleh orang lain, berupa nasihat atau petunjuk dalam hal orang lain melaksanakan kejahatan.

Perbedaan antara tiga cara tersebut pada pengancuran dengan pembantuan adalah dalam hal fungsinya atau sumbangannya. Dalam pengancuran fungsi atau andil dari penggunaan tiga upaya pengancuran itu adalah membentuk kehendak orang lain untuk melakukan tindak pidana. Mengapa demikian, karena dalam pengancuran, inisiatif untuk melakukan tindak pidana selalu berasal dari pembuat pengancurnya. Dalam pengancuran upaya yang digunakan berfungsi membentuk kehendak orang atau pembuat pelaksananya untuk melakukan tindak pidana. Antara penggunaan upaya

penganjuran dengan terbentuknya kehendak dalamenganjuran selalu terdapat hubungan kausal (*psychische causaliteit*).

Demikian juga ada perbedaan kesengajaan. Kesengajaan pembuatenganjur dalam menggunakan cara-caraenganjuran (termasuk tiga cara tersebut) ditujukan pada dua hal, yaitu: pertama terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan untuk melaksanakan tindak pidana, dan kedua ditujukan pada pelaksanaan tindak pidana oleh orang lain (yang dianjurkan).

Sedangkan pada bentuk pembantuan, ketiga cara tersebut di atas tidak berfungsi membentuk kehendak orang yang dibantu untuk melaksanakan kejahatan. Karena pada setiap bentuk pembantuan, kehendak untuk melakukan kejahatan pada pembuat pelaksananya telah terbentuk lebih dulu sebelum pembuat pembantu menyampaikan atau menggunakan tiga upaya pembantuan tersebut. Dalam bentuk pembantuan, memang kesengajaan pembuat pembantu dalam menggunakan tiga cara tersebut tidak ditujukan pada pembentukan kehendak orang yang dibantunya (pembuat pelaksananya), tetapi ditujukan untuk sekedar mempermudah atau memperlancar bagi pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana tidak ada hubungan dengan kehendak atau kesengajaan pembuat pembantu. Timbulnya kehendak pembuat pelaksana bukan karena tiga upaya yang digunakan oleh pembuat pembantu.

Adapun perbedaan pembantuan dengan turut serta melakukan terdapat tiga teori, yaitu sebagai berikut.²⁹

a. Teori Obyektif (*de obyektieve deelnemings theorie*)

Untuk membedakan antara turut serta dengan pembantuan dilihat dari sifat perbuatan yang merupakan obyek tindak pidana. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menurut sifatnya adalah merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang, maka orang tersebut melakukan dalam bentuk "turut serta". Sedangkan apabila orang tersebut perbuatannya tidak bersifat tindak pidana, dia dianggap melakukan "pembantuan".

b. Teori Subyektif (*de subyektieve deelnemings theorie*)

Dasar teori ini adalah niat dari para peserta dalam suatu penyertaan. Di dalam "turut serta" pelaku memang mempunyai kehendak terhadap terjadinya tindak pidana. Sedangkan dalam "pembantuan" kehendak ditujukan kearah "memberi bantuan" kepada orang yang melakukan tindak pidana.

Disamping perbedaan kehendak, dalam "turut serta" pelaku mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Apakah ia dibantu atau tidak tetap dia mempunyai tujuan melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam "pembantuan" tidak mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Artinya tujuan disandarkan kepada tujuan sipelaku utama. Artinya "pembantu" hanya

²⁹ HegarSandro, 2010, Teori Penyertaan Tindak Pidana Prof. Lobby Luqman. Hegarsandro.wordpress.com. Diakses Pada tanggal 28 Desember 2013 pukul 20:00 Wita

meberikan bantuan apabila ia mengetahui ada orang lain yang akan melakukan tindak pidana.

Dalam hal kepentingan, peserta dalam “turut serta” mempunyai kepentingan dalam tindak pidana, sedangkan dalam “pembantuan” kepentingannya terhadap terjadinya tindak pidana itu, tetapi terbatas atas bantuan yang diberikan.

c. Teori Gabungan (*verenigings theorie*)

Artinya dalam hal penerapan delik digunakan teori obyektif. Karena delik formil melarang perbuatan seseorang, sehingga tepat apabila digunakan teori obyektif. Dalam delik materiil digunakan teori subyektif. Karena lebih melihat akibat yang dilarang undang-undang. Dengan digunakannya teori subyektif dapat dilihat kehendak, tujuan serta kepentingan masing-masing peserta.

Dalam membedakan antara “turut serta” dengan “pembantuan” didalam praktek sering dilihat apakah seseorang memenuhi syarat dari bentuk “turut serta” yakni terdapat kesadaran kerjasama dan kerja sama itu secara fisik. Sedangkan apabila tidka memenuhi syarat diatas, peserta diklasifikasikan sebagai ‘pembantuan’.

Dalam hal ini seseorang atau beberapa orang yang turut serta dalam suatu tindak pidana dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dapat dihukum (*Straf Baar*). Sebagaimana yang telah diatur dalam Bab V Buku I (Pasal 55-56) KUHP.

D. Pidana Dan Pemidanaan

1. Tujuan Pemidanaan

Pidana atau *straf* menurut Van Hamel adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.³⁰

Dari pengertian mengenai pidana tersebut dapat diketahui bahwa pidana sebenarnya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti pidana bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa yang tidak enak bagi yang bersangkutan.

Sementara menurut Sudarto, perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Bahwa penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara

³⁰ Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33

pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.³¹

Adapun mengenai teori pemidanaan, dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan,³² yaitu:

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorie*)

Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Dimana pidana merupakan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu

³¹ *Ibid*, hlm, 35

³² Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 157

diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu bersifat menakut-nakuti dan bersifat memperbaiki serta bersifat membinasakan.

c. Teori Gabungan (*vernegings theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu pertama teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat. Dan yang kedua teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

2. Jenis-Jenis Pidana

Hukum pidana Indonesia mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Sebagaimana dalam Pasal 10 KUHP, pidana pokok terbagi atas:

a). Pidana Mati

Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 KUHP, “pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”

b). Pidana Penjara

P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa,³³ “bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut”

c). Pidana Kurungan

Pidana kurungan juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan sama dengan pidana penjara, namun pidana kurungan dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara.

d). Pidana Denda

Merupakan hukuman yang berupa kewajiban bagi seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut untuk mengembalikan keseimbangan hukum dengan pembayaran sejumlah uang tertentu, dikarenakan orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana.

Adapun pidana tambahan terdiri dari, yaitu:

³³ *Ibid*, hlm. 110

a). Pencabutan hak-hak tertentu

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP hak-hak yang dapat dicabut, yaitu:

- 1). Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- 2). Hak untuk memasuki dan menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI;
- 3). Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4). Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- 5). Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- 6). Hak menjalankan mata pencaharian.

b). Pidana perampasan barang-barang tertentu

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, yang diatur dalam Pasal 39 KUHP, yaitu:

- 1). Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*.
- 2). Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*.

c). Pidana pengumuman keputusan hakim

Hal ini diatur dalam Pasal 43 KUHP, bahwa:

“didalam hal-hal yang hakim memerintahkan mengumumkan keputusannya menurut kitab undang-undang umum yang lain, ditentukan pula cara bagaimana menjalankan perintah itu atas ongkos siterhukum”

E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi yaitu argumen atau alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim itu sendiri terbagi atas dua kategori yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

Menurut Lilik Mulyadi hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim.³⁴

Dasar hukum mengenai pertimbangan hakim itu sendiri diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang bunyinya :

³⁴ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 193.

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”.

Adapun pertimbangan non yuridis itu sendiri, hakim melihat dari latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, hal-hal apa yang menyebabkan timbulnya keinginan atau dorongan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dan bagaimana akibat dari perbuatan terdakwa serta melihat keadaan atau kondisi diri terdakwa, keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum dan pada saat melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.

Dalam praktik peradilan dalam putusan Hakim sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan maka Hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang *locus* dan *tempus delicti*, *modus operandi* bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung dan tidak langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, dan sebagainya yang berasal dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penyusunan proposal skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Pangkajene yang menangani kasus Tindak Pidana Pembunuhan Secara Bersama-sama.

B. Jenis Dan Sumber Data

Data yang diperoleh yang akan digunakan penulis dalam penelitian itu sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Pengadilan Negeri Pangkajene yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada narasumber.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya tulis ilmiah, artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya

dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum yang mengikat, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penanganan masalah tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, hasil penelitian, catatan, dokumentasi kajian-kajian, dan referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier dari penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjangkau data yang diperlukan sebagai analisis dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*), yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas seperti hakim dan jaksa yang menangani kasus tersebut (kasus yang diangkat menjadi judul skripsi).
- b. Studi dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini Pengadilan Negeri Pangkajene.

D. Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan proposal ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Kasus dalam Putusan Nomor 26/Pid.B/2013/PN.PKJ

1. Posisi Kasus

Pada tanggal 17 Desember 2012 sekitar jam 15:00 wita tahun 2012 bertempat di Kampung Aloise Desa Punranga Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep, Jemmaing Bin Maddi datang ke kebun dengan membawa parang bersama dengan anaknya Askar Bin Jemmaing menuju areal sawah dan kebun yang dekat dengan sawah milik H. Saing Bin H. Rahman.

Sebelumnya Jemmaing Bin Maddi berada di kebun miliknya dan melihat H. Saing Bin H. Rahman memasang patok di perbatasan tanah milik isteri Jemmaing Bin Maddi dan hal itu yang menyebabkan perselisihan antara Jemmaing Bin Maddi dan H. Saing Bin H. Rahman.

Kemudian terjadi perkelahian antara Jemmaing Bin Maddi dengan H. Saing Bin H. Rahman dengan menggunakan masing-masing parang panjang dan tidak lama kemudian Askar Bin Jemmaing datang langsung ikut memarangi H. Saing Bin H. Rahman hingga terpojok lalu keduanya kembali

bersama-sama memarangi H. Saing Bin H. Rahman secara berkali-kali dan mengalami luka-luka disekujur tubuhnya. Setelah melihat H. Saing Bin H. Rahman tidak berdaya dan tidak mampu lagi melakukan perlawanan Jemmaing Bin Maddi dan Askar Bin Jemmaing serta merta langsung meninggalkan dan membiarkan H. Saing Bin H. Rahman dalam kondisi yang berlumuran darah di tempat tersebut.

Beberapa menit kemudian korban H. Saing Bin H. Rahman meninggal dunia dengan luka disekujur tubuhnya yaitu luka robek pada telinga kanan mulai dari pertengahan telinga kearah pipi sepanjang $6 \times \frac{1}{2}$ cm, luka robek pada pipi kiri dari bawah telinga kiri kearah dagu sepanjang $8,5 \times 2$ cm, luka lecet pada bahu kiri sepanjang 3 cm, luka robek pada bahu kiri mulai dari pundak kiri kearah belakang pundak sepanjang 6×2 cm, luka robek pada siku kiri bagian dalam sepanjang 10×5 cm, luka robek pada telapak tangan kanan mulai dari telunjuk kearah tengah sepanjang 9×1 cm, luka robek pada telapak kanan mulai dari jari tengah kearah tengah sepanjang 9×1 c, luka robek pada jari manis kanan kearah tengah sepanjang 6×1 cm, luka robek pada kelingking kanan sepanjang $1 \times 0,5$ cm, luka robek pada paha kanan sepanjang $7,5 \times 1$ cm dan luka robek pada kepala sebelah kanan sepanjang 7×1 cm dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tajam sebagaimana *Visum Et Repertum* yang ditandatangani oleh dr. ANDI MARLINA, dokter pada Puskesmas Padanglampe.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Para terdakwa dalam kasus ini didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa JEMMAING Bin MADDI dan ASKAR Bin JEMMAING baik secara bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar jam 15:00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kampung Aloise Desa Punraga Kec. Ma'rang Kabupaten Pangkep yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, para terdakwa dengan sengaja telah menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban H. SAING Bin H. RAHMAN dengan menggunakan parang sehingga meninggal dunia di tempat kejadian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa I JEMMAING Bin MADDI sedang berada di kebun miliknya kemudian melihat korban H. SAING memasang patok di perbatasan tanah milik isteri terdakwa I JEMMAING Bin MADDI sehingga terjadi perselisihan antara terdakwa I dan korban H. SAING;

Selanjutnya terjadi perselisihan antara terdakwa I JEMMAING Bin MADDI dan korban H. SAING dengan menggunakan masing-masing parang panjang, tidak lama kemudian terdakwa II ASKAR Bin JEMMAING datang dan langsung ikut memarangi korban H. SAING hingga terpojok lalu kedua terdakwa kembali bersama-sama memarangi korban secara berkali-kali dan mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya;

Akhirnya beberapa menit kemudian korban H. SAING meninggal dunia dengan luka disekujur tubuhnya yaitu luka robek pada telinga kanan mulai dari pertengahan telinga kearah pipi sepanjang 6x½ cm, luka robek pada pipi kiri dari bawah telinga kiri kearah dagu sepanjang 8,5 x 2 cm, luka lecet pada bahu kiri sepanjang 3 cm, luka robek pada bahu kiri mulai dari pundak kiri kearah belakang pundak sepanjang 6 x 2 cm, luka robek pada siku kiri bagian dalam sepanjang 10 x 5 cm, luka robek pada telapak tangan kanan mulai dari telunjuk kearah tengah sepanjang 9 x 1 cm, luka robek pada telapak kanan mulai dari jari tengah kearah tengah sepanjang 9 x 1 c, luka robek pada jari manis kanan kearah tengah sepanjang 6 x 1 cm, luka robek pada kelingking kanan sepanjang 1 x 0,5 cm, luka robek pada paha kanan sepanjang 7,5 x 1 cm dan luka robek pada kepala sebelah kanan sepanjang 7 x 1 cm dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tajam sebagaimana *Visum Et Repertum* yang ditandatangani oleh dr. ANDI MARLINA, dokter pada Puskesmas Padanglampe;

**Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP;
SUBSIDAIR:**

Bahwa ia terdakwa JEMMAING Bin MADDI dan ASKAR Bin JEMMAING baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas, para terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang itu yaitu korban H. SAING Bin H. RAHMAN dengan menggunakan parang sehingga meninggal dunia di tempat kejadian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa I JEMMAING Bin MADDI sedang berada di kebun miliknya kemudian melihat korban H. SAING memasang patok di perbatasan tanah milik isteri terdakwa I JEMMAING Bin MADDI sehingga terjadi perselisihan antara terdakwa I dan korban H. SAING;

Selanjutnya terjadi perselisihan antara terdakwa I JEMMAING Bin MADDI dan korban H. SAING dengan menggunakan masing-masing parang panjang, tidak lama kemudian terdakwa II ASKAR Bin JEMMAING datang dan langsung ikut memarangi korban H. SAING hingga terpojok lalu kedua terdakwa kembali bersama-sama memarangi korban secara berkali-kali dan mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya;

Akhirnya beberapa menit kemudian korban H. SAING meninggal dunia dengan luka disekujur tubuhnya yaitu luka robek pada telinga kanan mulai dari pertengahan telinga kearah pipi sepanjang 6x½ cm, luka robek pada pipi kiri dari bawah telinga kiri kearah dagu sepanjang 8,5 x 2 cm, luka lecet pada bahu kiri sepanjang 3 cm, luka robek pada bahu kiri mulai dari pundak kiri kearah belakang pundak sepanjang 6 x 2 cm, luka robek pada siku kiri bagian dalam sepanjang 10 x 5 cm, luka robek pada telapak tangan kanan mulai dari telunjuk kearah tengah sepanjang 9 x 1 cm, luka robek pada telapak kanan mulai dari jari tengah kearah tengah sepanjang 9 x 1 c, luka robek pada jari manis kanan kearah tengah sepanjang 6 x 1 cm, luka robek pada kelingking kanan sepanjang 1 x 0,5 cm, luka robek pada paha kanan sepanjang 7,5 x 1 cm dan luka robek pada kepala sebelah kanan sepanjang 7 x 1 cm dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tajam sebagaimana *Visum Et Repertum* yang ditandatangani oleh dr. ANDI MARLINA, dokter pada Puskesmas Padanglampe;

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;
LEBIH SUBSIDAIR:**

Bahwa ia terdakwa JEMMAING Bin MADDI dan ASKAR Bin JEMMAING bik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair diatas, para terdakwa dengan sengaja melukai berat menyebabkan matinya orang lain

yaitu korban H. SAING Bin H. RAHMAN dengan menggunakan parang sehingga meninggal dunia di tempat kejadian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa I JEMMAING Bin MADDI sedang berada di kebun miliknya kemudian melihat korban H. SAING memasang patok di perbatasan tanah milik isteri terdakwa I JEMMAING Bin MADDI sehingga terjadi perselisihan antara terdakwa I dan korban H. SAING;

Selanjutnya terjadi perselisihan antara terdakwa I JEMMAING Bin MADDI dan korban H. SAING dengan menggunakan masing-masing parang panjang, tidak lama kemudian terdakwa II ASKAR Bin JEMMAING datang dan langsung ikut memarangi korban H. SAING hingga terpojok lalu kedua terdakwa kembali bersama-sama memarangi korban secara berkali-kali dan mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya;

Akhirnya beberapa menit kemudian korban H. SAING meninggal dunia dengan luka disekujur tubuhnya yaitu luka robek pada telinga kanan mulai dari pertengahan telinga kearah pipi sepanjang 6x½ cm, luka robek pada pipi kiri dari bawah telinga kiri kearah dagu sepanjang 8,5 x 2 cm, luka lecet pada bahu kiri sepanjang 3 cm, luka robek pada bahu kiri mulai dari pundak kiri kearah belakang pundak sepanjang 6 x 2 cm, luka robek pada siku kiri bagian dalam sepanjang 10 x 5 cm, luka robek pada telapak tangan kanan mulai dari telunjuk kearah tengah sepanjang 9 x 1 cm, luka robek pada telapak kanan mulai dari jari tengah kearah tengah sepanjang 9 x 1 c, luka robek pada jari manis kanan kearah tengah sepanjang 6 x 1 cm, luka robek pada kelingking kanan sepanjang 1 x 0,5 cm, luka robek pada paha kanan sepanjang 7,5 x 1 cm dan luka robek pada kepala sebelah kanan sepanjang 7 x 1 cm dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tajam sebagaimana *Visum Et Repertum* yang ditandatangani oleh dr. ANDI MARLINA, dokter pada Puskesmas Padanglampe;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) Jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP;

3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa I JEMMAING Bin MADDI dan terdakwa II ASKAR Bin JEMMAING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;

- 3) Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang dan bersarung terbuat dari kayu panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm lebar mata kurang lebih 3,5 cm dengan berlumuran darah milik terdakwa I JEMMAING Bin MADDI;
 - 1 (satu) bilah parang tidak bergagang, tidak bersarung, panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm lebar mata kurang lebih 3,5 cm milik terdakwa II ASKAR Bin JEMMAING;
 - 1 (satu) bilah parang tidak bergagang, tidak bersarung, panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm lebar mata kurang lebih 3,5 cm milik korban H. SAING Bin RAHMAN;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek berwarna putih yang berlumuran darah dan robek pada bahu kiri bahu belakang milik korban H. SAING Bin H. RAHMAN;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna hitam yang berlumuran darah milik korban H. SAING Bin H. RAHMAN;
 - 1 (satu) buah topi berwarna biru tua yang robek pada sisi kiri kanan yang berlumuran darah milik korban H. SAING Bin H. RAHMAN;
 - 1 (satu) buah kopiah haji warna kuning yang berlumuran darah milik korban H. SAING Bin H. RAHMAN;
 Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5) Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

4. Amar Putusan

- 1) Menyatakan terdakwa I, JEMMAING Bin MADDI dan terdakwa II, ASKAR Bin JEMMAING, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan Pembunuhan*"
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) tahun**;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam penahanan;
- 5) Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang dan bersarung terbuat dari kayu panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm lebar mata kurang

- lebih 3,5 cm dengan berlumuran darah milik terdakwa I JEMMAING Bin MADDI;
- 1 (satu) bilah parang tidak bergagang, tidak bersarung, panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm lebar mata kurang lebih 3,5 cm milik terdakwa II ASKAR Bin JEMMAING;
 - 1 (satu) bilah parang tidak bergagang, tidak bersarung, panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm lebar mata kurang lebih 3,5 cm milik korban H. SAING Bin RAHMAN;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek berwarna putih yang berlumuran darah dan robek pada bahu kiri bahu belakang milik korban H. SAING Bin H. RAHMAN;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna hitam yang berlumuran darah milik korban H. SAING Bin H. RAHMAN;
 - 1 (satu) buah topi berwarna biru tua yang robek pada sisi kiri kanan yang berlumuran darah milik korban H. SAING Bin H. RAHMAN;
 - 1 (satu) buah kopiah haji warna kuning yang berlumuran darah milik korban H. SAING Bin H. RAHMAN;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

5. Analisis Penulis

Dalam perkara yang penulis bahas ini penuntut umum mendakwa para terdakwa dengan **Dakwaan Subsidaritas** yakni **Dakwaan Primair** Pasal 338 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 KUHP, **Subsidair** Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, **Lebih Subsidair** Pasal 354 ayat (2) jo Pasal 55 KUHP.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, kemudian apabila dakwaan primair tidak terbukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, lebih subsidair dan sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair, lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menurut Penulis, penerapan hukum pidana dalam perkara ini belum tepat. Penuntut umum dalam dakwaannya belum tepat, melihat dari alasan terdakwa I Jemmaing Bin Maddi melakukan pemarkaran terhadap korban H. Saing Bin H. Rahman adalah adanya sengketa lahan antara kedua belah pihak sebelumnya. Yakni terdakwa I Jemmaing Bin Maddi telah menduga korban H. saing bin H. Rahman memindahkan batas patok kebun milik istri terdakwa I dan terdakwa I sudah menyampaikan rasa keberatan atas hal tersebut kepada anak korban, namun tidak ada respon dari korban. Dari adanya sengketa lahan tersebut sangat memungkinkan adanya indikasi perencanaan pembunuhan oleh terdakwa terhadap korban artinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa terdapat unsur berencana.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan ini adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum pemangku hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab. Dimana terdakwa dalam kasus ini adalah terdakwa I Jemmaing Bin Maddi dan terdakwa II Askar Bin Jemmaing.

2. Unsur dengan Sengaja

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat

dari perbuatannya. Perbuatan tersebut benar-benar diisyafi atau disadari serta pelaku tindak pidana tersebut juga menyadari akan akibat dari perbuatannya.

Perbuatan para terdakwa selain dikehendaki juga mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut yaitu menyebabkan kematian karena dengan adanya pamarangan terhadap korban secara membabi buta. Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

3. Direncanakan Terlebih Dahulu

Yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah bagi pelaku antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo atau waktu yang cukup untuk memikirkan perbuatannya. Dalam memutuskan kehendaknya untuk membunuh dan mewujudkan kehendaknya dilakukan dengan tenang.

Dalam hal ini unsur direncanakan tidak terdapat dalam dakwaan penuntut umum sesuai dengan dengan dakwaannya yaitu dakwaan subsidaritas yakni dakwaan primair Pasal 338 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 KUHP, subsidair Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, lebih subsidair Pasal 354 ayat (2) jo Pasal 55 KUHP.

4. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Maksud dari menghilangkan nyawa orang lain adalah adanya kematian yang disebabkan oleh perbuatan pelaku. Perbuatan pelaku menyebabkan kematian bagi korban.

Karena dengan meninggalnya korban H. Saing adalah sebagai akibat perbuatan para terdakwa karena kekerasan benda tajam sebagaimana *Visum Et Repertum* yang ditandatangani oleh dr. Andi Marlina dokter pada Puskesmas Padanglampe. Dengan demikian Unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi.

5. Yang melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan

Unsur ini merupakan bentuk dari penyertaan (*deelneming*) yang maksudnya adalah adanya keikutsertaan atau terlibatnya seseorang atau beberapa orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Dalam hal ini ada dua orang yang melakukan pamarangan yang menyebabkan kematian terhadap korban H. Saing yakni terdakwa I Jemmaing Bin Maddi dan terdakwa II Askar Bin Jemmaing. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Dari uraian menurut Penulis Penuntut Umum harus mendakwakan para terdakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 26/Pid.B/2013/PN.
Pangkajene**

1. Pertimbangan Hakim

Pokok-pokok pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan didapati fakta bahwa pamarangan yang telah dilakukan terhadap korban H. Saing Bin H. Rahman di Kampung Aloise Desa Punranga Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep pada Hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 wita adalah dilakukan oleh terdakwa I Jemmaing Bin Maddi dan terdakwa II Askar bin Jemmaing;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya itu para terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap para terdakwa mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur "Barang Siapa" disini oleh Majelis Hakim dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa kehendak dan pengetahuan akan hubungan antara perbuatan dengan akibat yang akan muncul sudah diketahui oleh para terdakwa sebelum melakukan perbuatannya itu atau setidaknya pada saat memulai perbuatan tersebut, oleh karena itu maka terhadap unsur "Dengan Sengaja" Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti yang telah diajukan dipersidangan serta alat bukti surat *visum et repertum* yang mana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan sehingga didapatlah fakta bahwa terdakwa II Askar Bin Jemmaing turut melakukan perbuatan pidana dimana pada saat itu melakukan pamarangan bersama-sama dengan terdakwa I Jemmaing Bin Maddi terhadap korban H. Saing Bin H. Rahman yang menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa II Askar Bin Jemmaing telah turut melakukan pamarangan terhadap korban H. Saing, maka terhadap unsur turut serta melakukan Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan”

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dari Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap dakwaan subsidair, lebih subsidair Majelis Hakim berpendapat untuk tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap diri

para terdakwa telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapati hal-hal yang menjadi dasar alasan untuk menghapuskan pidana atas diri para terdakwa, baik secara pemaaf atau pun membenar, oleh karena itu kepada diri para terdakwa dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan harus dihukum pula untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tidak hanya telah menyebabkan hilangnya nyawa orang lain akan tetapi juga telah mendatangkan duka yang begitu mendalam pada keluarga korban H. Saing Bin H. Rahman dan hal ini tidak dapat diganti atau ditukar dengan apa pun juga, oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai hal-hal yang memberatkan diri terdakwa;

Menimbang, bahwa hal-hal yang meringankan para terdakwa bahwa selama dalam persidangan para terdakwa berlaku sopan, para terdakwa juga belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas

dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pembedaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pembedaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri para terdakwa akan tetapi kualitas dari pembedaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa selama ditahan dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya untuk membebaskan para terdakwa dari tahanan, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan ketentuan para terdakwa tetpa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

2. Analisis Penulis

Putusan akhir (vonis) oleh hakim merupakan akhir dari suatu proses peradilan yang menentukan apakah tersangka dalam kasus tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau tidak. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah,

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHP. Putusan akhir yang menyatakan tersangka terbukti melakukan suatu tindak pidana didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana terhadapnya sebagai amar putusan. Sebelumnya dalam putusan tersebut hakim mengemukakan pertimbangan-pertimbangannya.

Pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut meliputi pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti serta pasal-pasal hukum pidana dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

Dalam putusan Nomor 26/Pid.B/2013/PN. Pangkajene, pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim sudah benar karena sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hakim dalam mengambil keputusan sebelumnya melakukan pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis maupun non yuridis. Dari segi pertimbangan yuridis misalnya melakukan pertimbangan dari dakwaan penuntut umum, dakwaan penuntut umum inilah yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan dimuka persidangan.

Dalam perkara ini, tersangka didakwa dengan **Dakwaan Subsidaritas** yakni **Dakwaan Primair** Pasal 338 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 KUHP, **Subsida** Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, **Lebih Subsidair** Pasal 354 ayat (2) jo Pasal 55 KUHP. Dalam hal ini Majelis Hakim berpatokan dari dakwaan

ini dengan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, lebih subsidair dan sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair, lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi. Dari dakwaan tersebut tidak ada pasal yang menjerat tersangka melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama yakni Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP yang menurut penulis pembunuhan tersebut merupakan pembunuhan berencana seperti yang telah dipaparkan sebelumnya (pada penerapan hukum pidana materiil).

Dalam perkara ini menurut Penulis Majelis Hakim sudah benar dalam melakukan pertimbangan, yakni melakukan pertimbangan yuridis dengan melihat dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti serta pasal-pasal hukum pidana dan pertimbangan non yuridis dengan melihat dari latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Serta Majelis Hakim melihat pula dari hal-hal yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain dan juga mendatangkan duka yang mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan. Dan dari hal-hal yang meringankan yakni terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materiil oleh jaksa penuntut umum dalam putusan no. 26/Pid.B/2013/PN.Pangkajene belum tepat. Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan Dakwaan Subsidiaritas yakni Dakwaan Primair Pasal 338 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 KUHP, Subsidiar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Lebih Subsidiar Pasal 354 ayat (2) jo Pasal 55 KUHP. Jaksa penuntut umum tidak menjerat terdakwa dengan Pasal 340 KUHP, yang menurut penulis tindak pidana yang dilakukan terdakwa terdapat unsur “berencana”.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No. 26/pid.B/2013/PN.Pangkajene sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum menjatuhkan putusan hakim melakukan pertimbangan yaitu dengan pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti serta pasal-pasal hukum pidana dan pertimbangan non yuridis dengan melihat dari latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Dalam menyusun surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat serta lebih memahami asas-asas hukum pidana agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum pidana materiil yakni dalam hal menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan kepada terdakwa.
2. Hakim dalam memutus suatu perkara lebih memperhatikan fakta-fakta yang timbul pada saat persidangan dengan melihat pertimbangan yuridis dan non yuridisnya serta lebih memperhatikan pula unsur-unsur tindak pidananya, apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dapat dipidana. Dan juga dalam memutus suatu perkara lebih melihat faktor-faktor yang memberatkan dan faktor-faktor yang meringankan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adnan, Wahyu. 2007. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Bandung: Gunung Aksara.

Ali, Achmad. 2010. *Yusril Versus Criminal Justice System*. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.

Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

-----, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Keempat*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Hartanti, Evi. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.

Lamintang, Theo. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marpaung, Leden. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.

Sudarsono. 2007. Kamus Hukum, Cetakan kelima. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materil*. Jakarta: Djambatan.

Widnyana, I Made. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Fikahati Aneska.

Website:

Sandro, Hegar. 2010. Teori Penyertaan Tindak pidana Prof. Lobby Luqman.

Hegarsandro.wordpress.com. Diakses Pada Tanggal 28 Desember

2013 Pukul 20:00 Wita